

Damai Papuaku

Suatu refleksi atas zoonpolitikon Aristoteles demi Papua Tanah Damai

Oleh: Ignasius Silubun, OFM

Abstrak: Terwujudnya Papua Tanah Damai, hanya akan terjadi tatkala negara menjalankan fungsi dan tanggungjawab dengan tepat dan masyarakat membantu mewujudkannya. Hal prinsipil adalah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara di setiap daerah di Indonesia.

Martabat manusia diremehkan, pembunuhan marak terjadi, sila ke-dua patut dipertanyakan.

Keadilan sosial hanya tataran ide, realisasinya malah terwujudnya ketimpangan sosial. Kita patut sadari bahwa semua kita adalah makhluk politik (zoonpolitikon) yang bertanggung jawab pula untuk melaksanakan kewajiban untuk bersama-sama menghadirkan damai di Papua. Damai Papuaku bukan hanya menjadi urusan Negara, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.

Pendahuluan

Ketimpangan sosial, terutama kemiskinan dan termarginalisasinya masyarakat setempat merupakan faktor pemicu lahirnya berbagai konflik dan masalah. Meskipun saya sadari bahwa semangat “Papua Tanah Damai” yang bergaung tanpa hentinya lahir dari suatu realitas kepahitan bahwa Papua saat ini sedang menangis. Pada artikel ini saya membatasi persoalan pada ketimpangan sosial, terutama kemiskinan dan termarginalisasinya masyarakat setempat, yang menurut hemat saya, persoalan-persoalan merupakan pula pemicu tidak adanya damai di Papua.

Menurut saya syarat dan jalan yang membantu manusia untuk meraih *bonum commune* (kebaikan bersama) agar terwujudnya “Papua Tanah Damai” adalah pertama-tama memahami dengan baik gagasan dari filsuf ternama Aristoteles tentang *zoonpolitikon* – manusia sebagai makhluk politik. Kini kehidupan politik tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita perlu masuk ke dalam realitas dan dilema politik yang terjadi saat ini. Percayalah, bahwa kita tidak pernah akan keluar dari masalah-masalah tanpa terlibat di dalamnya.

Artikel ini pertama-tama menampilkan beberapa masalah sosial yang memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Papua adalah karena suatu sistem yang keliru. Kedua menggunakan konsep *zoonpolitikon* Aristoteles sebagai solusi mewujudkan Papua tanah damai. Metode penulisan ialah menggunakan referensi yang ada sebagai bahan refleksi untuk mencari solusi agar cita-cita Papua Tanah Damai dapat terwujud.

Situasi Kita

Membaca buku “Termarginalisasi Kelapa Sawit – Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua” karya Bernardus Renwarin kita akan berhadapan dengan suatu kenyataan bahwa kemiskinan dan termarginalisasi suatu masyarakat karena adanya perubahan. Salah satunya karena kebun kelapa sawit yang ditampilkan dalam penelitian Bernardus Renwarin di Workwana, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kelapa sawit dijanjikan membawa perubahan yang baik tetapi kemudian semua tinggal janji. Masyarakat sekitar malah merasa dirugikan. Sebab lahan berkebun dan berburu mereka tergantikan dengan kelapa sawit, aset pendapatan mereka menghilang. Menurut saya peristiwa tersebut adalah kegagalan

dari pemerintah dalam mempersiapkan daerah dan masyarakatnya dalam rangka percepatan perkembangan dan perubahan yang tidak bisa dibendung. Hal senada juga diungkapkan oleh Alexandro F. Rangga, OFM dalam dua bukunya tentang Papua “Fenomena-fenomena Papua” dan “Tindakan Politik Bagi Papua”. Dua buku yang berbicara tentang Papua menyajikan suatu fakta atas kebenaran bahwa kemiskinan yang terjadi adalah pemiskinan oleh pihak-pihak tertentu dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya berupa pelaksanaan ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan serta fungsi keadilan. Negara berfungsi untuk membuat kehidupan negara dan rakyatnya semakin layak untuk dihidupi. Paling kurang Rangga memberikan suatu gambaran dari fenomena Otonomi Khusus yang tidak berdasar atas aspirasi rakyat. Bahkan hanya menguntungkan segelintir orang dan kelompok serta tragedi Asmat yang menghebohkan Negara pada September 2017 hingga Januari 2018, dilihatnya bahwa penanggulangan yang amat sangat terbatas.

Zoonpolitikon

Manusia pada dirinya adalah makhluk politik. Makhluk politik – *zoonpolitikon* yang menurut pemahaman Aristoteles sebagai makhluk yang hidup dalam sebuah *polis* (Koten, 2010: 159). Manusia yang hidup dalam sebuah *polis* adalah manusia yang ada untuk saling terhubung dan saling berinteraksi. Manusia sebagai makhluk politik juga adalah makhluk rasional (Koten, 2010: 163). Adanya rasionalitas menghantar manusia untuk berpikir secara kritis atas realitas yang terjadi di sekitarnya. Melihat dan menilai apakah suatu realitas telah terjadi sesuai dengan nilai-nilai luhur *polis* atau malah sebaliknya. Jika realitas terjadi diluar nilai-nilai luhur suatu *polis* maka manusia bertanggung jawab untuk mengusahkan kesesuaian antara realitas dan idealisme dari nilai-nilai luhur *polis*. Pokok penting dari *polis* dalam konteks di negara kesatuan Indonesia ialah Pancasila.

Seorang *zoonpolitikon* akan bertindak dan menuntut kebenaran dan keadilan jika realitas yang ada di Papua tidak sesuai dengan Pancasila. Jika terjadi di Papua hanya ada penyimpangan terhadap kemanusiaan yang tidak dihargai, malah terjadi pembunuhan yang tidak manusiawi dan seterusnya. Mayoritas masyarakat yang hidup melarat dan di bawah garis kemiskinan dan sebagian lagi hidup mewah dan berkelimpahan harta maka sila kelima dari Pancasila dipertanyakan. Sekali lagi adanya *polis* perlu dipertanyakan bahkan diperdebatkan.

Makhluk Politik memiliki kedadaran bahwa adanya *polis* bukan saja berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan finansial semata tetapi suasana iklim keadaan damai. Adanya *polis* bukan tentang “pembangunan hanya dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, cenderung merendahkan martabat manusia dengan mengorbankan pribadi manusia, dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendalam pada tuntutan dari keuntungan ekonomis saja” (Tebay, 2008: 69). Prinsip dasar dari manusia sebagai makhluk politik yang membangun polis yakni bahwa ia berjuang untuk menciptakan suatu sirkulasi keadaan damai.

Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial “mengandung” kehancuran dan “melahirkan” berbagai persoalan kekerasan, diskriminasi, rasialisme, kecurigaan atau prasangka buruk terhadap orang lain, perampokan, konflik, dan seterusnya. Pada prinsipnya adanya ketimpangan sosial mengakibatkan banyak hal buruk dapat terjadi. Ketimpangan sosial merupakan faktor

pemicu berbagai persoalan yang terjadi baik di Papua dan daerah-daerah yang merasa senasib di tanah air – *universal sufferage*.

Ketimpangan sosial membangun rasa tidak puas terhadap kenyataan yang dialami. Wajar saja manusia sebagai *zoonpolitikon* merasa tidak puas tatkala kenyataan berbenturan dengan harapan, sesuatu yang terjadi tidak sesuai keinginan dan impiannya. Mengharapkan suatu kehidupan yang terhormat dengan alasan bahwa kita-lah tuan atas kehidupan dan tanah kita. Kenyataannya malah ditindas, kekayaan alam dikuras tanpa mempedulikan nasib sang tuan. Menginginkan kehidupan yang sejahtera dan makmur, tetapi kenyataannya hidup melarat.

Keadaan-keadaan yang tercantum atau ikut serta dalam keadaan damai yakni keadilan, kesejahteraan atau kemakmuran, keharmonisan, semua peristiwa baik yang dialami manusia. Adanya keadaan demikian merupakan gambaran dari adanya keseimbangan sosial. Tetapi perlu disadari bahwa ungkapan-ungkapan seperti keadilan, kesejahteraan atau kemakmuran dan keharmonisan serta kedamaian itu merupakan ungkapan tak berwujud. Ungkapan tak berwujud ini, bisa jadi hanya sebuah penyampaian belaka, misalnya kita mengatakan “Papua Tanah Damai” tetapi yang ada hanyalah air mata karena kelaparan, kemiskinan, keterasingan dari tanahnya sendiri, keterbelakangan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, serta penindasan kebudayaan dan nilai-nilai luhur bahkan pembunuhan terhadap orang tak bersalah. Dengan demikian kita perlu secara bersama sebagai *zoonpolitikon* mendobrak ketimpangan sosial yang terjadi karena sistem yang keliru, mendobrak kebiasaan yang memarginalisasikan dan memiskinkan orang lain.

Kesimpulan

Ungkapan kedamaian, keadilan, kesejahteraan atau kemakmuran dan keharmonisan merupakan ungkapan tak berwujud yang kaya akan makna dan pemahamannya. Ungkapan tak berwujud ini, bisa jadi hanya sebuah penyampaian belaka bahwa *bonum commune* telah tercipta. Namun yang ada hanyalah air mata karena kelaparan, keterasingan dari tanahnya sendiri, keterbelakangan pendidikan dan kesehatan serta penindasan kebudayaan. “*Tanah kita, tanah yang kaya, kita adalah tuan atas negeri kita, kita sejahtera*” pada kenyataannya kita hidup melarat di bawah kaki orang lain. Kita bukannya menjadi tuan, tetapi kita menjadi bawahan yang terus-menerus diperintah.

Terwujudnya “Damai Papuaku” yang disertai dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keharmonisan pada kehidupan manusia saat ini, hanya bisa terjadi jika adanya suatu pemahaman yang menyeluruh dan tak terpisah-pisah dalam semua aspek kehidupan. Sebagai makhluk politik- *zoonpolitikon* berjuang untuk menyatukan berbagai unsur kehidupan untuk mencapai *bonum commune* demi “Damai Papuaku”.

Penulis adalah Mahasiswa STFT Fajar Timur dan Fransiskan di Tanah Papua

Daftar Pustaka

Koten, Kelabu Yosepf. 2010. *Partisipasi Politik. Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalero

Rangga, A. F. 2018. *Fenomena Papua*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.
2020. *Tindakan Politik Bagi Orang Papua*. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.

Renwarin, Bernardus. 2017. *Termarginalisasi Kelapa Sawit- Resistensi dan Coping Orang Workwana Papua*. Salatiga: Satya Wacana University Press.

Tebay, Neles. 2008. "Mendalami Ajaran Gereja tentang Hak-hak Asasi Manusia" dalam *Limn. Jurnal Agama & Kebudayaan*. Vol. 4, No. 2, April 2008, halaman 69. Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.